

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)

Tias Monika Ferlia¹, Supami Wahyu Setyowati², Ati Retnasari³, Mochamad Fariz Irianto⁴

^{1,2,3,4} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Tias Monika Ferlia

E-mail: tiasmonika7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang disebarkan kepada pejabat yang bersentuhan langsung dengan laporan keuangan desa sebanyak 56 pejabat. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci - akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas laporan keuangan daerah

ABSTRACT

This research was consist with the goal of examining the effect of accountability, transparency and the government's internal control system on the quality of regional financial reports. The data collection method used a questionnaire and the sample determination technique used purposive sampling which was distributed to officials who had direct contact with village financial reports as many as 56 officials. The results of the study simultaneously show that accountability, transparency and SPIP affect the quality of regional financial reports. Partially accountability has a positive effect on the quality of regional financial reports, transparency has no positive effect on the quality of regional financial reports, SPIP has a positive effect on the quality of regional financial reports.

Keywords - accountability, trasnparancy, government's internal control system, quality of regional financial reports

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, sehingga wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012).

Akuntansi Sektor publik terkait dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik adalah instrument komunikasi baik pemerintah sebagai manajemen maupun instrument informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. (Mardiasmo 2018).

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Dadang Suhendar (2017) mengungkapkan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Armando, 2013) mengungkapkan Sistem pengendalian intern pemerintah signifikan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan dan Penerapan pengawasan keuangan daerah signifikan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Laporan keuangan sektor publik yang ideal adalah yang dapat memenuhi syarat kualitatif Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

1. Relevan Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan

diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:
 - a. Dapat diuji kebenarannya (verifiable) Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.
 - b. Netral Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu
 - c. Penyajian secara wajar/ jujur (representational faithfulness) Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Akuntabilitas

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 (Sujarweni, 2015) Menyebutkan tata kelola yang baik merupakan salah satu tuntutan publik yang harus dipenuhi, salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Macam-macam akuntabilitas publik (Mahmudi, 2015), yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber dana kepada otoritas yang mempunyai tugas dan wewenang yang lebih tinggi, contohnya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Lembaga perwakilan atau secara langsung. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pelayanan publik. Aplikasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik, pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaiannya sehingga program tersebut dapat memberikan hasil maupun dampak seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan (Arifani, et al., 2018)

Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi adalah keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi (Shafwatunnisa, 2015).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan

kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).

H1: Variabel akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Penelitian Dadang Suhendar, (2017) Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil kajian Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Armando (2013) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah. Hasil kajian SPIP signifikan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan, Penerapan pengawasan keuangan daerah signifikan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan

H2: Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

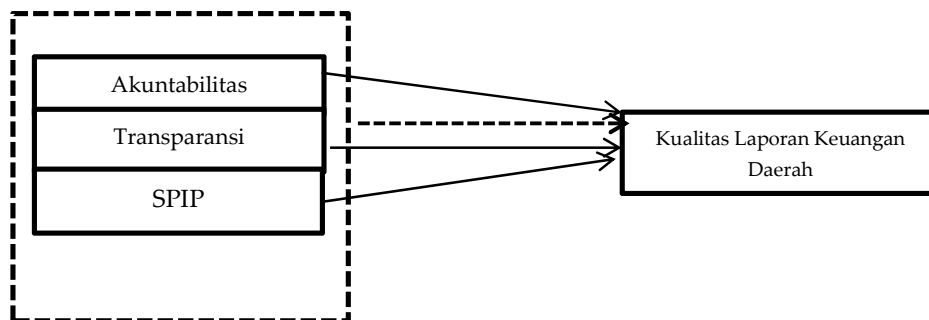
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Febri (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

H3: Variabel transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso, 2019) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali hubungan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H4: Variabel SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

(Febri S et al., 2019) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

→ : Pengaruh secara parsial (individu)
- - - - -> : Pengaruh secara simultan (bersama-sama)

METODE

Rancangan penelitian mencakup pendekatan yang dilakukan dalam penelitian agar penelitian bisa dijalankan dengan baik. Sesuai tujuan penelitian yang ingin menguji dan menjelaskan hubungan antar variabel, maka jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Hermawan, 2009). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat yang ada di BKAD Kabupaten Malang.

Menurut Nanang (2014:75) Sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan sebuah isu yang sangat krusial yang dapat menentukan keabsahan hasil dari sebuah penelitian. Penentuan ukuran sampel apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Ukuran sampel dalam penelitian ini sebesar 25% dari total populasi, sehingga jumlah sampel sebesar 13 jabatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive judgment sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Jadi pengambilan anggota sampel penelitian ini berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel penelitian sebesar 56 sampel.

Definisi operasional dan pengukuran variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi. Variabel merupakan pusat perhatian didalam penelitian kuantitatif, secara singkat variabel dapat didefinisikan sebagai konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu nilai Nanang (2015:59). Terdapat dua jenis variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu variabel independent dan variabel dependen.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. (Mardiasmo, 2018).

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi (Shafwatunnisa, 2015).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tecermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Variabel dependen dalam penelitian adalah kualitas laporan keuangan daerah (Y) dan variabel independennya adalah Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), SPIP (X3). Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, dapat digunakan model regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

α = Konstanta.

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi dari setiap variabel independen.

X1 = Akuntabilitas.

X2 = Transparansi

X3 = SPIP

e = Kesalahan pengganggu (*error term*).

Dalam menggunakan alat analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, agar hasil dari analisis regresi ini menunjukkan hubungan yang *valid*.

a. Uji Normalitas

Penggunaan analisis statistik Parametrik harus memenuhi asumsi data berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan pengujian Normalitas Data. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan pengujian normalitas data Univariate yaitu metode Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria apabila nilai signifikansi lebih besar 0.05 atau 5%, maka data berdistribusi normal (Endi, 2018:98)

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah gejala adanya hubungan linear yang sempurna (sangat kuat) diantara variabel bebas yang dianalisis. Model regresi mengasumsikan tidak adanya multikolinieritas atau tidak adanya hubungan (korelasi) yang sempurna antara variabel yang satu dengan variabel bebas yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel bebas, dimana jika nilai terdapat $VIF > 5$ maka terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi (Endi, 2018:96).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berarti varian residual tidak sama untuk seluruh pengamatan, atau semakin besarnya residual untuk pengamatan yang semakin banyak. Model regresi linear mengasumsikan bahwa varian residual bersifat konstan atau sama untuk berbagai pengamatan atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan metode Rank Spearman Correlation dengan cara menghitung korelasi antara nilai residual sebagai variabel terikat dengan variabel bebas. Jika masing-masing variabel bebas tidak berkorelasi secara signifikan pada $\alpha=0,05$ dengan nilai residual, maka dalam regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Endi, 2018:97).

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Pengujian regresi linear berganda bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan daerah secara signifikan dan simultan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yaitu akuntabilitas, transparansi dan SPIP.

PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Nilai signifikan Kolmogorov Smirnov dengan melihat Asymp Sig, suatu data yang dinyatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) hasil penelitian Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 atau 5%. Nilai asymp sig sebesar 0,923 melebihi 0,05 (5%). Ini berarti bahwa data variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Artinya model regresi variabel pengganggu atau variabel yang tidak diteliti memiliki distribusi normal.

- Uji Multikolinieritas

Hasil uji asumsi klasik multikolinieritas dengan menggunakan pendekatan VIF (*Variance Inflation Faktor*) menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 sehingga data pengamatan tidak terjadi multikolinieritas.

- Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat varian yang tidak sama dalam suatu pengamatan. Metode yang digunakan pada uji ini yaitu Metode Rank Spearman Correlation dengan kriteria jika masing-masing variabel bebas tidak berkorelasi secara signifikan pada $\alpha=0,05$ dengan nilai residual maka dalam regresi atau variabel bebas memiliki nilai lebih dari 0,05

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,666 + 0,281 X_1 - 0,016 X_2 + 0,595 X_3$$

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.666	.283		2.354	.022
	Akuntabilitas	.281	.080	.326	3.503	.001
	Transparansi	-.016	.071	-.025	-.229	.820
	SPIP	.595	.116	.632	5.144	.000
a. Dependent Variable: KLKD						

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2023)

Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,666 menunjukkan bahwa jika akuntabilitas, transparansi, dan penggunaan sistem pengendalian intern pemerintah tetap dan tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka nilai konstanta kinerja keuangan pemerintah desa yang dicapai sebesar 0,666.
2. Koefisien regresi akuntabilitas (X_1) sebesar 0,281 menunjukkan bahwa koefisien akuntabilitas bernilai positif yang memiliki makna regulasi berpengaruh positif artinya setiap terjadi kenaikan akuntabilitas sebesar 1, maka akan menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,666 dengan asumsi tidak dipengaruhi faktor lainnya.
3. Koefisien regresi transparansi (X_2) sebesar -0,016 menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai negatif yang menandakan bahwa hubungan antara transparansi dan kualitas laporan keuangan daerah adalah negatif artinya apabila transparansi bertambah sebesar 1, maka kualitas laporan keuangan daerah akan menurun sebesar 0,016 dengan asumsi tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya.
4. Koefisien regresi sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) sebesar 0,595 menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif yang memiliki makna sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif artinya setiap terjadi kenaikan regulasi sebesar 1, maka akan menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,595 dengan asumsi tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Analisis Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung 2,354 signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hasil Uji Hipotesis Kedua

Variabel transparansi memiliki t hitung -0,229 dan nilai signifikansi 0,820 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ditolak.

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Variabel penggunaan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki t hitung 5,144 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

Pengujian hipotesis pertama yang menunjukkan pengaruh secara simultan bahwa regulasi, integritas dan penggunaan Siskeudes berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa sehingga hipotesis pertama dikatakan diterima. Hal tersebut berdasarkan tabel 4.10 yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 50,616 dan signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$, hal tersebut dapat diartikan bahwa akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa (Y). Tabel 4.12 yang menunjukkan nilai dari R^2 adalah 73% yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas, ransparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 73%. Sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti.

Hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Febri: 2019), transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah (Herlina (2021), sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Dadang Suhendar: 2017)

Pengujian hipotesis kedua yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal tersebut berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.11 yang menunjukkan nilai t hitung 3,503 dan signifikansi $0,001 < 0,05$ yang diartikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil analisis juga diperoleh nilai koefisien yang positif yang menandakan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Febri (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengujian hipotesis ketiga yang meunjukkan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut berdasarkan pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.11 yang menunjukkan t hitung -0,229 dan nilai signifikansi $0,820 > 0,05$ yang diartikan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil analisis juga diperoleh nilai koefisien yang negatif yang menandakan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya transparansi maka akan terjadi penurunan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso 2019) menyatakan bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini memunculkan konflik dalam teori keagenan, dimana pejabat BKAD sebagai agen masih diperlukan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang dalam profesinya tentunya akan dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang sulit yang akan menggoyahkan perilaku transparan. Sehingga akan memberikan hasil yang berbeda antara situasi dan kondisi yang nyata dan teori yang ada. Hal tersebut yang menjadi gagalnya praktek transparansi dalam melaksanakan kinerjanya. Pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh pengelola keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah disebabkan karena masih terdapat kekurangan dalam kejujuran dalam menaati peraturan, keberanian untuk mengungkapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan, dan sikap bijaksana dalam menyikapi permasalahan. Pelaksanaan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya berusaha bekerja dengan sebaiknya, bersikap terbuka dan jujur, dan selalu membangun kepercayaan dan tanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengujian hipotesis keempat yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat diterima. Hal tersebut berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.11 yang menunjukkan nilai t hitung 5,144 dan signifikansi $0,000 < 0,05$ yang diartikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil analisis juga diperoleh nilai koefisien yang positif yang menandakan bahwa penggunaan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan SPIP maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian oleh Febri (2019) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya diperoleh bahwa akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian intern pemerintah yang dimiliki oleh pejabat BKAD kabupaten Malang maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam mengelola keuangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atas kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Anggraeni et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pejabat di BKAD Kabupaten Malang telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dengan adanya peraturan yang ada dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Transparansi merupakan keterbukaan Lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataan akan muncul pilihan-pilihan yang dapat menggoyahkan untuk bertindak secara transparan. Sehingga terjadi kegagalan bersikap transparan dalam menjalankan profesinya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan daerah yang menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BKAD Kabupaten Malang telah memberikan dampak baik kepada pejabat yang mengelola keuangan, Sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah serta menggunakan variabel-variabel yang lain untuk memperbarui penelitian serta untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan semester II Tahun 2019,, (Online), (<http://www.bpk.go.id/>, diakses 25 Januari 2023).
- Darmawan Ayang, Darwanis. 2018. Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap

- kualitas laporan keuangan SKPA provinsi Aceh. Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi, Vol, No 1.
- Deddi Nordiawan (2020), Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono dan Abdillah (2014). Partial Least Square (PLS). Yogyakarta: Andi.
- Herawati Tuti, 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan. Vol 11 No 1.
- Husna Tissa Nurul, 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD), Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern, dan Peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Vol 4 No 1.
- Hutapea dan Thoha, 2011. Kompetensi Komunikasi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang dinamis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ihsanti Emilda, 2014. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Kiranayanti Ayu Enny Ida, Erawati Ni Made Adi. 2016. Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas keuangan daerah. E-jurnal akuntansi Universitas Udayana. Vol 16 No 2.
- Merantika Rinka, Herianto Randy, 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal akuntansi dan manajemen, vol 12, No 2.
- Mokoginta Novtania, Lambey Linda, Pontoh Wiston. 2017. Pengaruh sistem pengendalian Intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Jurnal riset akuntansi going concern. Vol 12 No 2.
- Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Online), (<http://www.bpkp.go.id/> diakses 24 Januari 2023)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2011. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prabangsari Anissa Putri. 2018. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan standar akuntansi berbasis akrual sebagai variabel intervening.
- Prastiwi Ni Putu Jesica, Mimba Ni Putu Sri Harta. 2018. Pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan. E-jurnal akuntansi Universitas Udayana, Vol 25, No 2.
- Rahamawati Astika, Mustika I Wayan, Eka Lilik Handana. 2018. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Vol 20, No 2.
- Septiana Lola. 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artikel Ilmiah.
- Siregar, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutarman. 2012. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, Joko (2010), 6 Hari Jago SPSS 17, Yogyakarta: Cakrawala.
- Syarifudin Akhmad. 2014. Pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jurnal fokus bisnis, Vol 12 No 02.

- Wati Kadek Desiana, Herawati Nyoman Trisna, Sinarwati Ni Kadek. 2014. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAP, sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. E-jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha jurusan akuntansi program S1, Vol 2 No 1.
- Yensi Desi Sefri. 2014. Pengaruh sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern (internal audit) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Vol 1 no.
- Yosefrianaldi, 2013. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening, sistem pengendalian intern pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Vol 1 No 1.
- Abdul Halim. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukit tinggi). Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Vol 1, No 1 (2013) Hal 1-27
- Darmawan. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Ma-nusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Penge-n-dalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Nilai Infor-masi Laporan Keuangan Pe-merintah Daerah (Studi Empi-ris pada Pemerintah Kota Pa-dang). Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang
- Erlina Rasdianto 2013. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai Skpd di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)". Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Erma, S. & Shinta, P. S. (2014). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi. (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta) Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-Feb Ums, 25 Juni 2014. ISBN: 978-602-70429-2-6
- Indriasari, Desi. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber daya Ma-nusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten
- Nina E. W., & Helmy, A. (2015) Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Perspektif Teori Institusional: Studi kasus pada kabupaten pemerintah malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Putri, Darmawan dan Werastuti, 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng).
- Rosalin, F. & Kawedar, W. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro. Diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id/29439/1/jurnal.pdf>.
- Safiyulloh. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi informasi, Terhadap Keterandalan dan Ketepatan waktu dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: Studi Empiris di Pemda SUBOS

- Santoso, 2016. Pengaruh sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern (internal audit) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Vol 1 no.
- Sukmaningrum (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang, Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Wati Kadek Desiana, Herawati Nyoman Trisna, Sinarwati Ni Kadek. 2014. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAP, sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. E-jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha jurusan akuntansi program S1, Vol 2 No 1.